

1. DESKRIPSI UMUM

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta merupakan salah satu fakultas tertua di lingkungan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, karena fakultas ini sudah ada sejak Universitas Atma Jaya Yogyakarta berdiri pada tahun 1965.

Pada awalnya, Fakultas Hukum memiliki 145 mahasiswa. Sejak tahun 1998, Fakultas Hukum telah terakreditasi dengan sistem akreditasi yang dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN PT). Pada saat ini Fakultas Hukum memiliki lebih kurang 1.600 mahasiswa.

Visi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menjadi lembaga pendidikan tinggi hukum yang berfungsi sebagai mediator dalam proses transformasi sosial untuk menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi tantangan jaman, memiliki kepekaan dan moralitas tinggi dalam **semangat** kerasulan yang dijiwai oleh iman kristiani.

Misi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta adalah menghasilkan lulusan yang profesional di bidang hukum serta memiliki integritas moral yang tinggi dengan dijiwai oleh semangat pelayanan dalam cahaya kebenaran, melalui:

1. Penyelenggaraan perkuliahan yang berkualitas dengan berorientasi pada terwujudnya keseimbangan kemampuan kognitif, afektif dan psikomotorik segenap civitas akademika;
2. Penyelenggaraan penelitian yang berorientasi pada terwujudnya perubahan tatanan dalam masyarakat yang lebih baik dan sejahtera;
3. Penyelenggaraan pengabdian masyarakat yang berorientasi pada pemberdayaan (*empowering*) masyarakat.

Dengan melihat visi dan misi tersebut maka Fakultas Hukum selalu berusaha memberdayakan setiap insan fakultas dalam bidang akademik agar mampu menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan tinggi dalam memecahkan masalah-masalah hukum (*the power of solving legal problems*) dalam tataran lapisan ilmu hukum yaitu dogmatika hukum.

2. PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

a. Tujuan Pendidikan

Perkembangan global menuntut tersedianya Sarjana Hukum yang berkualitas. Hal ini berarti sarjana hukum dituntut memiliki dasar teori ilmu hukum yang memadai dan memiliki wawasan global. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta (FH UAJY) dalam menyelenggarakan pendidikan hukum telah menangkap dan mengantisipasi kebutuhan tersebut. FH UAJY memberikan bekal sehingga lulusannya diharapkan :

- Memiliki integritas keilmuan yang tinggi dalam bidang ilmu hukum yaitu profesional dan memiliki semangat pelayanan dalam cahaya kebenaran, dengan dukungan kemampuan akademik yang tinggi sehingga mampu bersaing dalam dunia kerja di era globalisasi dengan tetap peka terhadap persoalan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat;

- Menghasilkan penelitian, ide, gagasan, pemikiran-pemikiran yang berkualitas guna pengembangan ilmu hukum, perubahan, penegakan hukum serta perubahan tatanan masyarakat yang lebih berkeadilan dan sejahtera;
- Melaksanakan tanggung jawab sosial untuk ikut menegakkan supremasi hukum serta ikut mengatasi persoalan keadilan dan kesejahteraan yang dihadapi masyarakat melalui berbagai bentuk pengabdian masyarakat, guna memberdayakan masyarakat.

Dengan demikian lulusan FH UAJY akan mampu berpikir yuridis, analitik dan kreatif dalam menghadapi tantangan masyarakat global.

b. Kurikulum

Dengan mempertimbangkan kebutuhan sarjana pada era global yang diwarnai dengan perkembangan bisnis global, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta mengembangkan **Pola Ilmiah Pokok (PIP) Hukum Ekonomi dan Bisnis**. Oleh karena itu, kurikulum yang berbasis kompetensi didesain untuk adaptif terhadap perkembangan bisnis global dan kebutuhan pasar kerja serta perkembangan teknologi informasi.

Kurikulum dengan penekanan pada PIP Hukum Ekonomi dan Bisnis ditindaklanjuti dengan kuliah-kuliah praktek yang sangat dekat dengan dunia bisnis senyatanya dan diberikan oleh dosen yang pakar dalam bidangnya.

Empat Program Kekhususan yang diselenggarakan yaitu :

1. Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis,
2. Program Kekhususan Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum,
3. Program Kekhususan Hukum Pertanahan, Pembangunan dan Lingkungan Hidup,
4. Program Kekhususan Hukum Kenegaraan, Pemerintahan dan Hubungan Internasional

Adapun kurikulum Fakultas Hukum UAJY adalah sebagai berikut :

KURIKULUM PROGRAM STUDI ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA TAHUN 2006

I. KURIKULUM INTI

A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Pendidikan Agama	2
2.	Pendidikan Pancasila	2
3.	Pendidikan Kewarganegaraan	2
JUMLAH		6

B. Mata Kuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Pengantar Ilmu Hukum (PIH)	4
2.	Pengantar Hukum Indonesia (PHI)	4
3.	Ilmu Negara	2
4.	Hukum Perdata	4
5.	Hukum Pidana	4
6.	Hukum Tata Negara	4
7.	Hukum Administrasi Negara	4
8.	Hukum Internasional	4
9.	Hukum Acara Perdata	4
10.	Hukum Acara Pidana	4
11.	Hukum Dagang	4
12.	Hukum Adat	2
13.	Hukum Islam	2
14.	Hukum Agraria	3
15.	Hukum Acara PTUN	2
16.	Hukum Lingkungan	3
JUMLAH		54

C. Mata Kuliah Keahlian Berkarya (MKB)

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum (<i>memilih 3 mk. dari 6 mk. PLKH</i>)	
a.	PLKH. Kontrak	2
b.	PLKH. Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR)	2
c.	PLKH. Praktek Peradilan Perdata	2
d.	PLKH. Praktek Peradilan Pidana	2
e.	PLKH Perundang-Undangan	2
f.	PLKH. Praktek PTUN	2
g.	PLKH Eksaminasi	2
JUMLAH		6

2.	Penulisan Hukum/ Skripsi	4
3.	Metodologi Penelitian dan Penulisan Hukum	3
JUMLAH		7

D. Mk. Perilaku Berkarya (MPB)

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Etika dan Tanggungjawab Profesi	2
2.	Filsafat Hukum	2
JUMLAH		4

E. Mk. Berkehidupan Bersama (MBB)

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Antropologi Budaya	2
2.	Sosiologi	2
3.	Hak Azasi Manusia (HAM)	2
JUMLAH		6

II. KURIKULUM INSTITUSIONAL**A. Mata Kuliah Pengembangan Kepribadian (MPK)**

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Bahasa Inggris	2
JUMLAH		2

B. Mk. Keilmuan dan Keterampilan (MKK)

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Hukum Harta Kekayaan	3
2.	Hukum Pidana Di luar Kodifikasi	3
3.	Hukum Pemerintahan Pusat	3
4.	Hukum Perdagangan Internasional	3
5.	Hukum Sarana Pemerintahan	3
6.	Hukum Perjanjian Internasional	3
7.	Hukum Pertanahan	3
8.	Hukum Perburuhan	2
9.	Perbandingan Hukum Perdata	2
10.	Hukum Perdata Internasional	2
11.	Hukum Pajak	2
12.	Hukum Perdata Islam	2
13.	Hukum Kekerabatan	2
14.	Hukum Lingkungan Internasional	2
15.	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
16.	Ekonomi Pembangunan Indonesia	2
JUMLAH		39

C. Mk. Keahlian Berkarya (MK B) 24 SKS**1. Mata Kuliah Wajib**

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Bahasa Inggris Hukum	2
2.	Hukum Perjanjian	2

2. Mata Kuliah Pilihan

Pilihan Bebas (memilih 10 mk. dari mk. Pilihan PK yang ada) 20 SKS

PK I : Hukum Ekonomi dan Bisnis

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Hukum Perusahaan	2
2.	Hukum Perbankan	2
3.	Hukum Asuransi	2
4.	Hukum Transportasi	2
5.	Hukum Penanaman Modal	2
6.	Hak Atas Keakayaan Intelektual	2
7.	Hukum Persaingan	2
8.	Surat Surat Berharga	2
9.	Kepailitan	2
10.	Hukum Perlindungan Konsumen	2
11.	Hukum Perjanjian Jenis Baru	2
12.	Hukum Jaminan	2
13.	Hukum Bangunan	2
14.	Hukum Kesehatan	2
15.	Hukum Pajak Khusus	2
16.	Ketenagakerjaan	2
17.	Hukum Pidana Ekonomi	2
18.	Hukum Keluarga	2
19.	Perbandingan Hukum Waris	2
20.	Hukum Perijinan	2
21.	Hukum dan Teknologi Informasi	2
22.	Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi	2
23.	Hukum Ekonomi Internasional	2
24.	Hukum dan Gender	2
25.	Hukum Peradilan Niaga	2
26.	Hukum Peradilan Pajak	2
27.	Hukum Gereja Katolik	2
28.	Hukum ekonomi Islam	2
29.	Kontrak Bisnis Transnasional	2

PK II : Peradilan dan Penyelesaian Sengketa Hukum

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Kriminologi	2
2.	Hukum Pidana Ekonomi	2
3.	Viktimologi	2
4.	Sistem Peradilan Pidana	2
5.	Politik Kriminal	2
6.	Hukum Pidana Adat	2
7.	Hukum Pidana Militer	2
8.	Perbandingan Hukum Pidana	2
9.	Penyelesaian Sengketa Lingkungan	2
10.	Hukum Pembuktian	2
11.	Penologi	2
12.	Hukum Pidana Internasional	2
13.	Advokatur	2
14.	Sistem Peradilan Perdata	2
15.	Hukum dan Gender	2
16.	H.Peradilan Pajak	2
17.	H.Peradilan Niaga	2

PK III : Hukum Pertanahan, Pembangunan, dan Lingkungan Hidup

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Politik Hukum Pertanahan	2
2.	Pemilikan dan Penguasaan Atas Tanah	2
3.	Pendaftaran Tanah	2
4.	Pengurusan Hak Atas Tanah	2
5.	Penatagunaan Tanah	2
6.	Hukum Penataan Ruang	2
7.	Hukum Tanah Adat	2
8.	Perbandingan Hukum Tanah	2
9.	Hukum Keluarga	2
10.	Perbandingan Hukum Waris	2
11.	Hukum Perindustrian	2
12.	Hukum Pertambangan	2
13.	Hukum Kehutanan	2
14.	Hukum Kepariwisata	2
15.	Hukum dan Kependudukan	2
16.	Hukum Perijinan	2
17.	Hukum dan Gender	2
18.	AMDAL	2

PK IV : Hukum Kenegaraan, Pemerintahan, dan Hubungan Internasional

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Teori Konstitusi	2
2.	Hukum Pemerintahan Lokal	2
3.	Hukum Kewarganegaraan	2
4.	Hukum Kepegawaian	2
5.	Hukum Perijinan	2
6.	Hukum Keuangan Negara	2
7.	Hukum Benda Milik Negara	2
8.	Hukum Pajak Khusus	2
9.	Hukum Organisasi Internasional	2
10.	Hukum Laut Internasional	2
11.	Hukum Angkasa	2
12.	Hukum Humaniter Internasional	2
13.	Hukum Diplomatik dan Konsuler	2
14.	Aspek-aspek Hukum Alih Teknologi	2
15.	Hukum Ekonomi Internasional	2
16.	Hukum Pidana Internasional	2
17.	Hukum dan Gender	2
18.	Hukum Pengungsi	2
19.	Hukum Gereja Katolik	2

D. Mk. Berkehidupan Bersama (MBB) 2 SKS

NO.	NAMA MATA KULIAH	SKS
1.	Kuliah Kerja Nyata (KKN)	2

Catatan : Total 150 SKS

TAHAPAN PENGAMBILAN MATA KULIAH

SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
I	1	Agama	2
	2	Pancasila	2
	3	Ilmu Negara	2
	4	Pengantar Ilmu Hukum	4
	5	Pengantar Hukum Indonesia	4
	6	Sosiologi	2
	7	Pengantar Ilmu Ekonomi	2
		JUMLAH	18
SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
II	1	Ekonomi Pembangunan	2
	2	Antropologi Budaya	2
	3	Hukum Perdata	4
	4	Hukum Tata Negara	4
	5	Hukum Pidana	4
	6	Hukum Adat	2
	7	Pendidikan Kewarganegaraan	2
		JUMLAH	20
SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
III	1	Hukum Internasional	4
	2	Hukum Administrasi Negara	4
	3	Hukum Agraria	3
	4	Hukum Pidana Di Luar Kodivikasi	3
	5	Hukum Dagang	4
	6	Bahasa Inggris	2
		JUMLAH	20
SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
IV	1	Hukum Sarana Pemerintahan	3
	2	Hukum Acara Perdata	4
	3	Hukum Acara Pidana	4
	4	Hukum Harta Kekayaan	3
	5	Hukum Perdagangan Internasional	3
	6	Hukum Perjanjian Internasional	3
		JUMLAH	20
SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
V	1	Hukum Acara PTUN	2
	2	Hukum Pertanahan	3
	3	Hukum Lingkungan	3
	4	Perbandingan Hukum Perdata	2
	5	Hukum Kekerabatan	2
	6	Hukum Islam	2
	7	Bahasa Inggris Hukum	2
	8	Hukum Pemerintahan Pusat	3
		JUMLAH	19

SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
VI	1	Hukum Lingkungan Internasional	2
	2	Hukum Perdata Internasional	2
	3	Hukum Pajak	2
	4	Filsafat Hukum	2
	5	Hukum Perjanjian	2
	6	Hukum Perburuhan	2
	7	Hukum Perdata Islam	2
	8	Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum	6
		JUMLAH	20
SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
VII	1	Mata kuliah PK	2
	2	Mata kuliah PK	2
	3	Mata kuliah PK	2
	4	Mata kuliah PK	2
	5	Mata kuliah PK	2
	6	Metodologi Penelitian Hukum	3
	7	Etika dan Tanggung Jawab Profesi	2
	8	Kuliah Kerja Nyata	2
		JUMLAH	17
SEMESTER	NO	NAMA MATA KULIAH	SKS
VIII	1	Mata kuliah PK	2
	2	Mata kuliah PK	2
	3	Mata kuliah PK	2
	4	Mata kuliah PK	2
	5	Mata kuliah PK	2
	6	Hak Azasi Manusia (HAM)	2
	7	Penulisan Hukum/ Skripsi	4
		JUMLAH	16

MATA KULIAH PRASYARAT (PREREQUISITE)

NO.	MATA KULIAH	PRASYARAT
1.	Ekonomi Pembangunan	Pengantar Ilmu Ekonomi
2.	Hukum Perdata	PIH / PHI
3.	Hukum Pidana	PIH / PHI
4.	Hukum Dagang	Hukum perdata
5.	Hukum Islam	PIH / PHI
6.	Hukum Tata Negara	PIH / PHI / Ilmu Negara
7.	Hukum Internasional	PIH / PHI / Ilmu Negara
8.	Hukum Adat	PIH / PHI
9.	Hukum Agraria	PIH / PHI
10.	Hukum Administrasi Negara	PIH / PHI / Ilmu Negara
11.	Hukum Acara Perdata	Hukum Perdata
12.	Hukum Acara Pidana	Hukum Pidana
13.	Hukum Perburuhan	Hukum Perdata
14.	Hukum Harta Kekayaan	Hukum Perdata
15.	Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi	Hukum Pidana
16.	Hukum Pemerintahan Pusat	Hukum Tata Negara
17.	Hukum Perdagangan Internasional	Hukum Dagang
18.	Hukum Keekerabatan	Hukum Adat
19.	Hukum Sarana Pemerintahan	Hukum Administrasi Negara

20.	Hukum Pajak	Hukum Perdata / Hukum Administrasi Negara
21.	Hukum Perdata Islam	Hukum Islam
22.	Hukum Lingkungan	HAN/Perdata/Pidana
23.	Hukum Perjanjian Internasional	Hukum Internasional
24.	Hukum Pertanahan	Hukum Agraria
25.	Hukum Perdata Internasional	Hukum Perdata
26.	Perbandingan Hukum Perdata	Hukum Perdata
27.	Hukum Lingkungan Internasional	Hukum Lingkungan
28.	Hukum Acara Peradilan TUN	Hukum Administrasi Negara
29.	Hak Azasi Manusia	Hukum Pidana/ HTN/Hukum Internasional
30.	Hukum Perjanjian	Hukum Perdata
31.	Bahasa Inggris Hukum	Bahasa Inggris
32.	Pend. & Lat Kemahiran Hk (PLKH)	Telah menempuh dg nilai C mata kuliah sbb:
	- PLKH Kontrak	- Hukum harta kekayaan
	- PLKH Peny. Sengketa Alter.(ADR)	- Hukum Acara Perdata
	- PLKH Praktek Peradilan Perdata	- Hukum Acara Perdata
	- PLKH Praktek Peradilan Pidana	- Hukum Acara Pidana
	- PLKH Perundang-Undangan	- Hukum Tata Negara
	- PLKH Praktek PTUN	- Hukum Acara PTUN
	- PLKH Eksaminasi	- Hukum materiil sesuai tema tiapsemester
33.	Mata kuliah Program Kekhususan	- Menyelesaikan 110 SKS
		- Telah Lulus dengan Nilai B mata kuliah :
		A. PK 1 : - Ekonomi & Bisnis
		- Hukum Perdata/ Hukum Dagang
		B. PK 2 : - Perad. & Penyelesaian Sengketa Hk
		- Hk Pidana/Hk. Acr Perdata/Hk. Acr. Pidana
		C. PK3 : - Hk. Pertanahan, Pemb., & Lingk. Hidup
		- Hukum Agraria/ Hk. Lingkungan/Hk.Adat
		D. PK 4 : - Hk. Kenegaraan, Pemerintahan dan
		- Hubungan Internasional
		- HAN/ HTN/ Hukum nternasional
34.	Kuliah Kerja Nyata	- Telah menyelesaikan minimal 135 SKS
35.	Penulisan Hukum/ Skripsi	- Telah menyelesaikan 132 SKS ; IPK >= 2,25;
		- Mata kuliah Induk Progran Kekhususan >= B
		PK 1 : Hukum Perdata/ Hk Dagang
		PK 2 : Hk. Pidana/ Hk Acr Pidana/ Hk Acr Perdata
		PK 3 : Hk Agraria/ Hk Adat/ Hk Lingkungan
		PK 4 : HTN/ HAN/ Hukum Internasional
		- Telah lulus mata kuliah MPH

c. Deskripsi Mata Kuliah

PENDIDIKAN AGAMA, 2 SKS

Mendalami rumusan-rumusan iman Kristiani yang terdapat dalam tradisi Gereja, arti kehidupan menggereja dan pembaharuan dalam gereja secara benar serta mampu mempertanggungjawabkan iman secara rasional sehingga dapat mengurangi fanatisme yang berlebihan

PENDIDIKAN PANCASILA, 2 SKS

Memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang Pancasila sebagai dasar negara di dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN, 2 SKS

Untuk meneruskan nilai-nilai perjuangan bangsa yang terumus dalam Pancasila dan UUD 1945, mendasari, mengarahkan dan membentuk sikap mental dan tanggung jawab terhadap kelangsungan hidup bangsa dan negara, yang pada akhirnya memberikan bekal daya pengaman ampuh untuk menghadapi masalah saat ini dan masa yang akan datang.

PENGANTAR ILMU HUKUM (PIH), 4 SKS

Mengantarkan kepada mahasiswa yang mengawali belajar hukum, agar memahami dasar-dasar ilmu hukum yang akan dipelajari.

PENGANTAR HUKUM INDONESIA (PHI), 4 SKS

Mata kuliah ini merupakan mata kuliah dasar yang berisi tentang hukum sebagai tata hukum, khususnya tata hukum yang berlaku di Indonesia, dalam garis besarnya. Tujuannya agar mahasiswa mempunyai pengetahuan dan ikhtisar tentang tata hukum yang berlaku di Indonesia secara garis besar.

ILMU NEGARA, 3 SKS

Memberikan penjelasan kepada mahasiswa untuk dapat memahami pengertian, hakekat, tujuan, fungsi dan bentuk negara dalam rangka menghantarkan mahasiswa mempelajari mata kuliah lain yang berobyek negara.

HUKUM PERDATA, 4 SKS

Memahami dasar-dasar mengenai hukum orang, hukum benda, hukum keluarga dan hukum waris sehingga mahasiswa dapat mengaplikasikannya dalam kasus-kasus konkrit.

HUKUM PIDANA, 4 SKS

Memberikan pengetahuan dasar kepada mahasiswa tentang hukum pidana sehingga mampu memahami hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana dan pemidanaan.

HUKUM TATA NEGARA, 4 SKS

Memahami dan mendalami berbagai kaedah hukum (baik tertulis maupun tidak tertulis) yang berkaitan dengan pengaturan organisasi kekuasaan yang disebut negara, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan permasalahan pokok hukum tata negara Indonesia.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA, 4 SKS

Mengetahui Hukum Administrasi Negara secara menyeluruh sehingga mampu menjelaskan hubungan antara teori dan praktek Hukum Administrasi Negara, meningkatkan "sense of justice" dengan mencermati dan menganalisis kasus-kasus Hukum Administrasi Negara.

HUKUM INTERNASIONAL, 4 SKS

Tujuan mata kuliah ini adalah agar mahasiswa dapat memahami aspek-aspek hukum yang mengatur hubungan hukum antar subyek Hukum Internasional yang terdiri dari negara, Organisasi Internasional (publik) dan individu.

HUKUM ACARA PERDATA, 4 SKS

Merupakan mata kuliah keahlian yang memberikan pemahaman tentang hukum yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum perdata materiil melalui pengadilan beserta proses peradilannya, sehingga mahasiswa mempunyai bekal pengetahuan tentang bagaimana cara mengajukan tuntutan hak, cara memeriksa, memutus serta melaksanakan putusan.

HUKUM ACARA PIDANA, 4 SKS

Memberikan pengetahuan tentang mekanisme dan tahap-tahap dalam proses penyelesaian perkara pidana sehingga mahasiswa mampu memahami dan mendiskripsikan prosedur perkara pidana.

HUKUM DAGANG, 4 SKS

Memahami pengetahuan dasar Hukum Dagang, Alternative Dispute Resolution (ADR) termasuk di dalamnya Arbitrase, Persekutuan Perniagaan, Jual Beli Perusahaan serta Kepailitan dan Penundaan Pembayaran yang nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk memperdalam Hukum Perdagangan Internasional.

HUKUM ADAT, 2 SKS

Memahami tentang struktur tradisional masyarakat, hukum tanah, hukum delik adat sebagai pengantar dalam menelaah Hukum Kekeabatan

HUKUM ISLAM, 2 SKS

Memahami ruang lingkup hukum Islam, sumber hukum Islam, Al-Ahkham Al-Khamzah, serta sejarah zaman Nabi Muhammad sampai dengan sekarang, serta setelah mahasiswa mengetahui dan memahami kedudukan hukum Islam di Indonesia diharapkan mahasiswa dapat menjelaskannya dan membandingkannya dengan hukum pada umumnya, serta dapat memberikan contoh konkrit dalam kehidupan sehari-hari yang terjadi dalam masyarakat.

HUKUM AGRARIA, 3 SKS

Memahami Hukum Agraria dan hukum tanah serta hubungan antara politik pertanahan nasional dengan UUPA, sejarah perkembangan hukum tanah dan pembentukan UUPA, hukum tanah nasional, Pendaftaran tanah, penyelenggaraan Landreform dan Tata Guna Tanah.

HUKUM ACARA PERADILAN TATA USAHA NEGARA (PTUN), 2SKS

Memberikan bekal pengetahuan kepada mahasiswa tentang prinsip-prinsip perlindungan hukum melalui peradilan tata usaha negara, metode bekerjanya hukum acara peradilan tata usaha negara baik melalui upaya administratif, maupun melalui proses peradilan, memberikan kemampuan analisis terhadap obyek sengketa TUN maupun bekerjanya sistem peradilan TUN, sehingga mahasiswa mampu menerapkan kemampuan yang diperolehnya dalam profesinya sebagai yuris.

HUKUM LINGKUNGAN, 3 SKS

Memberi pemahaman kepada mahasiswa tentang kebijakan lingkungan serta peraturan hukum lingkungan dalam pengelolaan lingkungan di Indonesia, serta kasus-kasus lingkungan dan *legal reasoning* dalam menerapkan peraturan hukum lingkungan pada kasus-kasus lingkungan.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM, 3 SKS

Mata kuliah ini membahas tentang dasar-dasar penelitian pada umumnya dan khususnya penelitian hukum baik normatif maupun empiris yang meliputi antara lain : dasar-dasar penelitian pada umumnya dan penelitian hukum pada khususnya (Pengantar), kajian ilmu hukum dan penelitian (Pendahuluan), perumusan masalah dalam kajian ilmu hukum (Normatif dan Empiris), langkah-langkah kajian hukum, langkah-langkah penulisan laporan hasil penelitian/penulisan hukum.

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB PROFESI, 2 SKS

Memperkenalkan dan memberikan bekal tentang prinsip-prinsip etika profesi hukum kepada mahasiswa dengan harapan ketika menjalankan profesi hukum dapat berlandaskan pada moral etik.

FILSAFAT HUKUM, 2 SKS

Mengantar mahasiswa untuk memahami persoalan: mengapa manusia membuat hukum untuk dirinya sendiri, tujuannya, fungsi, peran dan kedudukan hukum dalam hidup bernegara

ANTROPOLOGI BUDAYA, 2 SKS

Memahami tentang ruang lingkup antropologi budaya mulai dari manusia yang mempunyai kepribadian yang hidup dalam masyarakat sehingga mampu mengaplikasikan dalam kehidupan bermasyarakat Bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa dan kebudayaan berguna untuk membentuk kepribadian dan persatuan Bangsa Indonesia.

SOSIOLOGI, 2 SKS

Memahami hukum secara sosiologis dengan berpijak pada hukum dan aturan dengan melakukan kajian dan analisis mengenai oraktek-praktek hukum yang dihubungkan dengan struktur sosial, fenomena sosial dan perubahan sosial, sehingga mahasiswa mampu memberikan analisis ilmiah dan kritis terhadap masalah-masalah hukum yang timbul dalam masyarakat.

HAK ASASI MANUSIA, 2 SKS

Mahasiswa dapat mengerti dengan baik dan menyadari Hak-hak Asasi Manusia. Dengan pemahaman akan HAM itu, mahasiswa diajak untuk membangun masyarakat yang berwawasan HAM

BAHASA INGGRIS, 2 SKS

Agar mahasiswa memperoleh kemampuan dalam penggunaan Bahasa Inggris secara umum

HUKUM HARTA KEKAYAAN, 3 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum dalam bidang hukum harta kekayaan, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PIDANA DI LUAR KODIFIKASI, 3 SKS

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang eksistensi dan perkembangan Hukum Pidana Di Luar Kodifikasi (KUHP) agar mahasiswa mampu memahami penyimpangan (kekhususan) ketentuan-ketentuan pidana di luar KUHP itu.

HUKUM PEMERINTAHAN PUSAT, 3 SKS

Memberi penjelasan kepada mahasiswa tentang sistem pemerintahan negara pada umumnya dan menurut UUD 1945 pada khususnya sehingga mahasiswa dapat memahami pembentukan, tugas/fungsi dan wewenang Badan Permusyawaratan dan Perwakilan dengan segala yang berkaitan dengan pemerintahan pusat

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL, 3 SKS

Mata kuliah Perdagangan Internasional merupakan kelanjutan dari Hukum Dagang. Dalam mata kuliah Hukum Perdagangan Internasional dibahas aspek-aspek perdagangan internasional dengan segala macam penunjang dari perdagangan internasional. Agar mahasiswa mampu menerangkan dan menganalisis permasalahan-permasalahan hukum yang timbul dalam bidang hukum perdagangan internasional.

HUKUM SARANA PEMERINTAHAN, 3 SKS

Mempelajari Hukum Sarana Pemerintahan secara menyeluruh dari sudut yuridis maupun teoritis sehingga mahasiswa mampu menguraikan kembali pemahaman sarana-sarana yang dibutuhkan dalam tindak pemerintah dan menjelaskan bagaimana perkembangan sarana tindak pemerintah secara teoritis maupun yuridis.

HUKUM PERJANJIAN INTERNASIONAL, 3 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas negara sebagai subyek hukum dengan negara lain sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERTANAHAN, 3 SKS

Agar mahasiswa memahami bidang hukum pertanahan yang merupakan pendalaman dari Hukum Agraria, yaitu Bidang Penatagunaan Tanah, Landreform/PPT, Pengurusan Hak atas Tanah, Pendaftaran Tanah.

HUKUM PERBURUHAN, 2 SKS

Memberikan penjelasan kepada mahasiswa agar setelah mahasiswa menempuh mata kuliah ini dapat memahami hak dan kewajiban buruh maupun majikan serta dapat memahami permasalahan perburuhan.

PERBANDINGAN HUKUM PERDATA, 2 SKS

Agar mahasiswa memahami bahwa setiap bangsa memiliki hukum sendiri yang berbeda dengan bangsa lain sehingga mampu mengkomparasikan berbagai sistem hukum, sekurang-kurangnya akan mengacu pada kelompok sistem hukum yang berafiliasi ke dalam sistem Eropa Kontinental.

HUKUM PERDATA INTERNASIONAL, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan subyek hukum yang berbeda sistem hukumnya sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PAJAK, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang perpajakan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERDATA ISLAM, 2 SKS

Mata kuliah Hukum Perdata Islam sebagai kelanjutan mata kuliah Hukum Islam, dengan mendalami Hukum Mu'amalah terutama yang menyangkut mengenai masalah pewarisan, perkawinan, perwakafan, dan hukum tentang harta dan milik (mu'amalah dalam arti sempit) serta mengetahui dan memahami tentang Peradilan agama di Indonesia

HUKUM KEKERABATAN, 2 SKS

Memberikan pengertian dan pemahaman kepada mahasiswa yang telah lulus hukum adat, tentang hukum perorangan, obyek hukum kekerabatan, ketunggalan silsilah dan kewangsaan, hukum perkawinan dan hukum waris.

HUKUM LINGKUNGAN INTERNASIONAL, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan lingkungan hidup sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul dari aktivitas perbankan.

PENGANTAR ILMU EKONOMI, 2 SKS

Mengetahui hubungan antara ilmu ekonomi dengan ilmu hukum sehingga dapat menerapkan dan menghubungkan pengetahuan di bidang hukum dengan masalah-masalah di bidang ekonomi.

BAHASA INGGRIS HUKUM, 2 SKS

Agar mahasiswa memahami isi bacaan di bidang hukum dalam bahasa Inggris dan percakapan dalam bahasa Inggris serta dapat berbicara dan menulis topik yang berkaitan dengan bidang hukum dalam bahasa Inggris.

HUKUM PERJANJIAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang perjanjian sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERUSAHAAN, 2 SKS

Mendalami teori dan hukum positif yang mengatur dunia usaha serta mengkaji kasus-kasus aktual, sehingga mahasiswa mempunyai gambaran yang lengkap baik aspek mikro maupun makro dan pada akhirnya mampu menganalisis berbagai praktek perusahaan dan sekaligus mendapatkan bekal mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menjalankan perusahaan.

HUKUM PERBANKAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas perbankan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul dari aktivitas perbankan.

HUKUM ASURANSI, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang asuransi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM TRANSPORTASI, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang transportasi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PENANAMAN MODAL, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang penanaman modal sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERSAINGAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang persaingan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM SURAT SURAT BERTAGIH, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang surat berharga sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM KEPAILITAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang kepailitan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM KONTRAK TRANSNASIONAL, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum bisnis secara global yang berkaitan dengan aktivitas di bidang kontrak-kontrak antar negara sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM DAN TEKNOLOGI INFORMASI, 2 SKS

Mendalami dan menganalisis berbagai persoalan hukum sebagai konsekuensi dari berkembangnya teknologi informasi yang revolusioner. Hukum ini juga dikenal dengan nama Cyberlaw. Oleh karena itu maka hukum dan teknologi informasi ini lebih menitik beratkan pada analisis hukum dengan adanya migrasi besar-besaran kehidupan fisik ke dalam

dunia maya dengan berkembangnya internet. Informasi elektronik sebagai 'a tool' Kontrak *online* dengan berkembangnya transaksi online (*Electronic Commerce*), *Alternative Dispute Resolution online*, dan perhubungan hukum *online* menjadi bahan kajiannya.

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang perlindungan konsumen sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERJANJIAN JENIS BARU, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang perjanjian jenis baru sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM JAMINAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang jaminan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM BANGUNAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang hukum bangunan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM KESEHATAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang hukum kesehatan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM KETENAGAKERJAAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang ketenagakerjaan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

ASPEK HUKUM ALIH TEKNOLOGI, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum yang timbul sebagai akibat dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang alih teknologi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PIDANA EKONOMI, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum dari aspek Hukum Pidana sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang ekonomi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERIJINAN, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum antara aparat publik dengan warga negara yang berkaitan dengan aktivitas perijinan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

KRIMINOLOGI, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan yang berkaitan dengan kejahatan, penjahat, dan reaksi sosial dari aspek non yuridis, dan mahasiswa dapat mengetahui hubungan antara Kriminologi dengan Hukum Pidana serta sumbangan Kriminologi bagi Hukum Pidana.

HUKUM PIDANA EKONOMI, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum dari aspek Hukum Pidana sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang ekonomi sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang timbul.

VIKTIMOLOGI, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan korban khususnya korban kejahatan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul.

POLITIK KRIMINAL, 2 SKS

Memahami dan mendalami upaya penanggulangan kejahatan baik secara penal maupun non penal sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan timbul

HUKUM PIDANA ADAT, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum di bidang pidana adat sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PIDANA MILITER, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum di bidang pidana militer sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PIDANA INTERNASIONAL, 2 SKS

Memahami dan mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan kejahatan internasional dan transnasional, kerjasama internasional di bidang prosedural, yurisdiksi kejahatan internasional, sanksi dan potensi kejahatan-kejahatan internasional sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan hukum yang timbul.

PERBANDINGAN HUKUM PIDANA, 2 SKS

Memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang berbagai sistem hukum pidana yang ada dalam 4 keluarga sistem hukum di dunia sehingga mahasiswa mampu membandingkan

berbagai sistem hukum pidana serta mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan hukum.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam hubungan hukum antara orang dengan sumberdaya alam sehingga mahasiswa mempunyai kemahiran didalam menganalisis dan memecahkan persoalan hukum lingkungan.

HUKUM PEMBUKTIAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan pembuktian pada sidang pengadilan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan menyelesaikan persoalan-persoalan hukum yang timbul.

ADVOKATUR, 2 SKS

Memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang aktivitas serta peranan dari pemberi bantuan hukum kepada klien dalam rangka menegakkan keadilan baik di dalam maupun di luar persidangan.

SISTEM PERADILAN PERDATA, 2 SKS

Mata kuliah sistem peradilan perdata ingin mengkaji peradilan dari aspek sistemnya, tentang peradilan-peradilan yang bersifat keperdataan. Tujuannya ingin memberikan pandangan menyeluruh (*bird view*) kepada mahasiswa tentang peradilan perdata sebagai sebuah sistem, sehingga mahasiswa dapat membedakannya dengan sistem-sistem

PENOLOGI, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum di bidang pemyarakatan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan mencari solusi atas persoalan-persoalan hukum yang timbul.

POLITIK HUKUM PERTANAHAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai perkembangan politik hukum pertanahan sebelum dan sesudah UUPA sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan hukum yang timbul.

PEMILIKAN DAN PENGUASAAN TANAH (LANDREFORM), 2 SKS

Agar mahasiswa memahami ruang lingkup bidang pemilikan dan penguasaan tanah (Landreform) yang merupakan mata kuliah pendalaman dari Hukum Pertanahan, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisa dan memecahkan kasus Bidang Pemilikan dan Penguasaan Tanah berdasar Hukum Pertanahan yang berlaku.

PENDAFTARAN TANAH, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam mekanisme dan kegiatan dalam rangka pendaftaran tanah, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

PENATAGUNAAN TANAH, 2 SKS

Memahami dan mendalami tentang penggunaan tanah yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan masalah hukum yang timbul.

HUKUM PENATAAN RUANG, 2 SKS

Agar mahasiswa dapat lebih mengetahui tentang hal-hal yang berkaitan dengan bidang penataan ruang seperti asas dan tujuan dalam penataan ruang, perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian dalam tata ruang.

HUKUM TANAH ADAT, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum tanah adat yang ada di Indonesia, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

PERBANDINGAN HUKUM TANAH, 2 SKS

Memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang berbagai sistem hukum tanah sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan-persoalan hukum.

PERBANDINGAN HUKUM WARIS, 2 SKS

Memberikan pemahaman kepada para mahasiswa tentang berbagai sistem hukum waris yang ada di Indonesia sehingga mahasiswa mampu membandingkan berbagai sistem hukum waris serta mampu menjelaskan persamaan, perbedaan berbagai sistem hukum waris serta memberikan rekomendasi mengenai sistem hukum waris.

HUKUM KEWARGANEGARAAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam hubungan hukum antara negara dengan warga negara, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang timbul.

HUKUM PERINDUSTRIAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul sebagai akibat aktivitas dalam bidang perindustrian, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM PERTAMBANGAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul sebagai akibat aktivitas dalam bidang pertambangan, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM KEHUTANAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam hubungan hukum antara orang dengan sumberdaya hutan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul dari aktivitas orang di bidang kehutanan.

HUKUM DAN KEPENDUDUKAN, 2 SKS

Mahasiswa memahami permasalahan-permasalahan Kependudukan dan Peranan Hukum dalam upaya untuk ikut memecahkan masalah-masalah kependudukan.

TEORI KONSTITUSI, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai teori berkenaan dengan sifat, isi dan perubahan kontitusi yang muncul.

HUKUM PEMERINTAHAN LOKAL, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam lingkup pemerintahan lokal sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM KEWARGANEGARAAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam hubungan hukum antara negara dengan warga negara, sehingga mahasiswa dapat mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang timbul.

HUKUM KEPEGAWAIAN, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang berkaitan dengan hubungan antara pegawai dengan negara dalam hubungan kepegawaian, sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM KEUANGAN NEGARA, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM BENDA MILIK NEGARA, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul berkaitan dengan pengadaan, pengurusan benda-benda milik publik dan pribadi pemerintah sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM PAJAK KHUSUS, 2 SKS

Mendalami berbagai persoalan hukum sebagai akibat yang timbul dari berbagai hubungan hukum yang berkaitan dengan aktivitas di bidang perpajakan sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi dan menganalisis persoalan-persoalan hukum yang timbul.

HUKUM ORGANISASI INTERNASIONAL, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul dalam berkenaan dengan kedudukan, aktivitas dan hubungannya dengan negara sebagai subyek hukum Internasional sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM LAUT INTERNASIONAL, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul sebagai akibat aktivitas negara sebagai subyek Hk. Internasional dalam hubungannya dengan wilayah laut sehingga

mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM ANGKASA, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum yang muncul sebagai akibat aktivitas negara sebagai subyek Hk. Internasional dalam hubungannya dengan ruang angkasa sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap tawanan, penduduk sipil, instalasi-instalasi non militer sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

HUKUM DIPLOMATIK DAN KONSULER, 2 SKS

Memahami dan mendalami berbagai persoalan hukum berkenaan dengan perlindungan hukum terhadap kedudukan, tugas, fungsi misi diplomatik dan konsuler sehingga mahasiswa mampu mengidentifikasi, menganalisis dan memecahkan persoalan hukum yang muncul.

3. FASILITAS PEMBELAJARAN

Guna menunjang proses belajar mengajar dan dalam rangka mempersiapkan alumni memasuki dunia kerja, FH UAJY mempunyai fasilitas yang lengkap yang diarahkan kepada **e-learning (electronic learning)**, antara lain : tersedianya ruang kuliah yang sangat memadai dan *online*, ruang diskusi, ruang praktek peradilan, laboratorium hukum (yang menyediakan layanan Acces User Center (AUC), riset online, perpustakaan khusus hukum), pusat dokumentasi hukum, Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH), Pusat-pusat studi dan lain-lain. Perpustakaan memiliki koleksi buku sangat lengkap, termasuk jurnal dari dalam dan luar negeri. Prosesing pencarian bahan pustaka dilakukan dengan *database* sehingga kebutuhan dapat dilayani secara cepat. Penguasaan aplikasi program komputer dan penguasaan bahasa Inggris hukum menjadi bagian kemahiran yang diberikan kepada mahasiswa FH UAJY.

a. Laboratorium Hukum

Laboratorium Hukum sebagai bagian dari Sistem Jaringan dan Dokumentasi Hukum Indonesia mengembangkan, *meng-up date* setiap mata kuliah kemahiran hukum.

Tujuan utama terletak pada peningkatan kemampuan mahasiswa untuk memperoleh ilmu yang sarat dengan muatan praktek. Melalui berbagai pelatihan, mahasiswa FH UAJY mendapatkan pengalaman praktek yang sangat bermanfaat dalam memasuki dunia kerja nantinya.

Laboratorium Hukum menyediakan Dokumentasi Hukum yang lengkap dalam bentuk CD ROM baik peraturan-peraturan nasional maupun Konvensi Internasional dan didukung oleh program komputer yang memadai, sehingga mampu menemukan jenis peraturan tertentu secara cepat. Dikembangkannya AUC (Acces User Center) yang dimaksudkan untuk penelusuran melalui internet bagi para mahasiswa untuk mengikuti perkembangan global, ruang riset untuk mahasiswa dengan perpustakaan lengkap dan prasarana komputer dengan kecepatan akses internet tinggi. Dikembangkannya website laboratorium hukum dengan antara lain mengembangkan kamus hukum online.com, mengembangkan buku-buku ajar dalam menunjang perkuliahan

b. PBKH

Pusat Bantuan dan Konsultasi Hukum (PBKH) merupakan salah satu wadah pengembangan pengabdian kepada masyarakat bagi dosen dan mahasiswa. PBKH juga memberikan pelayanan hukum baik litigasi, non litigasi maupun penyuluhan hukum kepada masyarakat dengan *Preferential Option for the Poor*. Secara periodik, PBKH mengadakan pelatihan kepengacaraan bekerja sama praktisi hukum senior, sehingga mahasiswa mendapat bekal yang memadai jika nantinya memilih profesi sebagai praktisi hukum di Pengadilan. Dikembangkannya website PBKH untuk pelayanan konsultasi dan bantuan hukum.

c. Pusat-Pusat Studi

Pusat studi adalah merupakan bagian integral dalam pengembangan ilmu hukum. Pusat studi ditujukan untuk mengembangkan riset-riset sesuai dengan kebutuhan aktual, mempertajam *legal reasoning* untuk memecahkan masalah-masalah aktual, wadah pengembangan *rechtscheping* (penciptaan hukum), *rechtsvinding* (penemuan hukum) dalam tataran lapisan hukum baik dogmatik hukum, teori hukum dan filsafat hukum. Pusat-pusat Studi yang sedang dikembangkan adalah: Pusat Studi Hukum Bisnis, Pusat Studi Hukum Kejahatan Transnasional, Pusat Studi Hukum Lingkungan, Pusat Studi *Cyberlaw* dan Pusat Studi Perundang-undangan.

d. Majalah Hukum *Justitia et Pax*

Majalah hukum dikembangkan untuk mempertajam kemampuan penulisan ilmiah para Dosen, mahasiswa, masyarakat akademisi di luar FH UAJY dengan pengelolaan oleh tim pakar sebagai dewan penelaah yang terdiri dari para Profesor dan Doktor serta Mitra Bestari dari Universitas Swasta dan Negeri yang bergelar Doktor.

4. MAGISTER ILMU HUKUM

a. Tujuan Pendidikan

Visi Program Magister Ilmu Hukum adalah turut serta membangun tatanan hukum dalam masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera melalui penciptaan ahli-ahli hukum yang handal dan berwawasan global serta mengutamakan nilai-nilai etis dalam mengimplementasikan keahlian di bidang hukum.

Misi Program Magister Ilmu Hukum adalah menyelenggarakan pendidikan pascasarjana bidang ilmu hukum yang selalu meningkatkan diri dalam pencapaian kualitas pengajaran dan pembelajaran; memberi akses ke proses belajar yang berkesinambungan serta mampu menjawab kebutuhan masyarakat dalam pencapaian ahli-ahli hukum yang handal.

b. Kurikulum

Dari 36 sks yang harus diselesaikan, 25 sks merupakan mata kuliah wajib yang harus ditempuh oleh semua peserta program termasuk mata kuliah konsentrasi 4 sks dan penulisan tesis 6 sks; sisanya 11 sks merupakan mata kuliah pilihan. Susunan mata kuliah yang harus ditempuh adalah sebagai berikut ini.

Mata Kuliah yang harus ditempuh

1) Mata Kuliah Inti (21 sks)

1. Teori Hukum 3 sks
2. Filsafat Hukum 2 sks
3. Sosiologi Hukum 2 sks
4. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik 3 sks
5. Sejarah Hukum 2 sks
6. Politik Hukum 3 sks
7. Tesis 6 sks

2) Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Bisnis (4 sks)

1. Hukum Perdagangan Internasional 2 sks
2. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi 2 sks

3) Mata Kuliah Wajib Konsentrasi Hukum Agraria (4 sks)

1. Politik Hukum Agraria 2 sks
2. Sejarah Perkembangan Hukum Agraria 2 sks

4) Mata Kuliah Pilihan Konsentrasi Hukum Bisnis (11 sks)

1. Hukum Perusahaan 3 sks
2. Penyusunan Kontrak Bisnis 2 sks
3. Penyelesaian Sengketa Bisnis 2 sks
4. Hukum Persaingan dan Perlindungan Konsumen 3 sks
5. Hukum Investasi dan Pasar Modal 3 sks
6. Hukum Lingkungan dan Perijinan 3 sks
7. Hak Atas Kekayaan Intelektual & Alih Teknologi 3 sks
8. Hukum Perbankan 2 sks
9. Hukum Pajak 2 sks
10. Etika Bisnis 2 sks

5) Mata Kuliah pilihan Hukum Agraria (11 sks)

1. Penatagunaan Tanah 2 sks
2. Penataan Ruang 2 sks
3. Pengurusan Hak-hak atas Tanah 3 sks
4. Pemilikan dan Penguasaan Tanah 3 sks
5. Pendaftaran Tanah 3 sks
6. Perbandingan Hukum Pertanahan 2 sks
7. Penyelesaian Sengketa Tanah 2 sks
8. Hukum Pajak 2 sks
9. Hukum Lingkungan dan Perijinan 3 sks
10. Hukum Jaminan atas Tanah 2 sks

Urutan Pengambilan Mata Kuliah

1) Program Penuh Waktu

Semester 1 (12 sks)

- | | |
|--------------------------|-------|
| 1. Teori Hukum | 3 sks |
| 2. Politik Hukum | 3 sks |
| 3. Filsafat Hukum | 2 sks |
| 4. Sejarah Hukum | 2 sks |
| 5. Mata Kuliah Pilihan 1 | 2 sks |

Semester 2 (12 sks)

- | | |
|--|-------|
| 1. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik | 3 sks |
| 2. Sosiologi Hukum | 2 sks |
| 3. Mata Kuliah Pilihan II | 3 sks |
| Konsentrasi Hukum Bisnis : | |
| 4. Hukum Perdagangan Internasional* | 2 sks |
| 5. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* | 2 sks |
| Konsentrasi Hukum Agraria : | |
| 4. Politik Hukum Agraria** | 2 sks |
| 5. Perkembangan Hukum Agraria** | 2 sks |

Semester 3 (12 sks)

- | | |
|----------------------------|-------|
| 1. Mata Kuliah Pilihan III | 3 sks |
| 2. Mata Kuliah Pilihan IV | 3 sks |
| 3. Tesis | 6 sks |

2) Program Paruh Waktu

Semester 1 (8 sks)

- | | |
|-------------------|-------|
| 1. Teori Hukum | 3 sks |
| 2. Politik Hukum | 3 sks |
| 3. Filsafat Hukum | 2 sks |

Semester 2 (6 sks)

- | | |
|---|-------|
| 1. Sosiologi Hukum | 2 sks |
| Konsentrasi Hukum Bisnis : | |
| 2. Hukum Perdagangan Internasional* | 2 sks |
| 3. Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi* | 2 sks |
| Konsentrasi Hukum Agraria : | |
| 2. Politik Hukum Agraria** | 2 sks |
| 3. Perkembangan Hukum Agraria** | 2 sks |

Semester 3 (6 sks)

- | | |
|-------------------------|-------|
| 1. Matakuliah Pilihan 1 | 3 sks |
| 2. Matakuliah Pilihan 2 | 3 sks |

Semester 4 (4 sks)

1. Sejarah Hukum 2 sks
2. Matakuliah Pilihan 3 2 sks

Semester 5 (6 sks)

1. Metodologi Penelitian Hukum dan Statistik 3 sks
2. Matakuliah Pilihan 4 3 sks

Semester 6 (6 sks)

1. Tesis 6 sks

Keterangan:

- * Wajib Konsentrasi Hukum Bisnis
- ** Wajib Konsentrasi Hukum Agraria

c. Deskripsi Mata Kuliah**TEORI HUKUM (3 SKS)**

Mata kuliah ini dimaksudkan untuk pengendapan metodologis pada dasar dan latar belakang dalam mempelajari hukum dalam arti luas. Pengendapan metodologis dilakukan dalam tiga kegiatan yuridis : hukum, praktek hukum (perundang-undangan dan peradilan) dan ilmu hukum. Permasalahan pokok adalah bagaimana hakim, pembentuk undang-undang dan ilmuwan bekerja serta metode apa yang digunakannya. Dalam hal ini perlu ditanamkan cara berpikir yuridis sistematis serta penguasaan tentang penemuan hukum.

FILSAFAT HUKUM (2 SKS)

Filsafat hukum akan meninjau ajaran-ajaran tentang filsafat hukum di dunia yang ada sekarang, baik dari dunia barat maupun dunia timur. Di samping itu akan melihat secara konkrit penerapannya dalam masyarakat Indonesia. Berdasarkan ajaran-ajaran yang ada atau akan dicetuskan berusaha dianalisis secara yuridis keadaan pembangunan Indonesia masa kini (terutama pembangunan ekonomi) dan mencari *legal way out* apabila dalam proses pembangunan tersebut tercermin hambatan-hambatan. Dengan demikian diharapkan melalui filsafat hukum, proses pembanguan di kemudian hari akan berintikan kebenaran dan keadilan.

SOSIOLOGI HUKUM (2 SKS)

Mata kuliah ini memberikan jalan bagi pemahaman secara sosiologis terhadap hukum. Melihat bagaimana konsep-konsep, adagia serta lembaga-lembaga hukum itu diwujudkan dalam kehidupan yang nyata. Sebagai kelengkapan pembahasan materi diuraikan pula perkembangan pemikiran sosiologi hukum, aliran-aliran yang ada serta perkembangannya di Indonesia sendiri.

METODOLOGI PENELITIAN HUKUM DAN STATISTIK (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip dan dasar penelitian pada umumnya dan penelitian hukum pada khususnya. Prinsip dasar penelitian pada umumnya antara lain meliputi hubungan antara ilmu pengetahuan dengan penelitian, pengertian, tujuan, manfaat, syarat, etika, jenis

dan tahap serta langkah-langkah penelitian (mulai dari penentuan masalah sampai dengan penulisan hasil penelitian). Prinsip dasar penelitian hukum antara lain meliputi pengertian, tujuan, sasaran, macam penelitian hukum, perumusan masalah dalam kajian ilmu hukum normatif dan langkah kajian hukum empiris serta penulisan hasil penelitian hukum.

SEJARAH HUKUM (2 SKS)

Mata kuliah Sejarah Hukum mengkaji perkembangan hukum dari masa lalu hingga masa kini, baik perkembangan hukum dalam sejarah dunia dari masa ke masa yang banyak mempengaruhi hukum di Indonesia maupun sejarah nasional Indonesia yang tumbuh dalam masyarakat Indonesia. Dalam materi sejarah hukum ini membahas mengenai pengertian sejarah hukum, rangkaian peristiwa yang mempengaruhi dan mengubah kehidupan masyarakat, dasar-dasar pemikiran hukum yang melandasinya dan hubungan kausal antar peristiwa yang terjadi dalam masyarakat.

POLITIK HUKUM (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas tentang prinsip-prinsip yang dapat menetapkan tujuan dengan bentuk, isi dan penjabarannya. Pokok bahasan dalam mata kuliah ini meliputi berbagai faktor antara lain: program legislasi nasional; analisis politik hukum yang berpengaruh dalam pembentukan dan penerapan hukum.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (3 SKS)

Dalam mata kuliah ini akan dibahas masalah-masalah dalam hukum dagang, hukum administrasi dan hukum transnasional sebagai akibat dipindahkannya barang-barang melalui batas-batas wilayah nasional suatu negara. Masalah-masalah tersebut berkaitan dengan perjanjian import ekspor; pengangkutan barang melalui laut; asuransi dan LC; ketentuan administratif; kontrak dagang internasional; penyelesaian sengketa dagang; lembaga-lembaga yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Hal lain yang juga menjadi pokok bahasan adalah bentuk pengawasan dari pemerintah, misalnya penggunaan tarif, qouta, GATT/WTO dan berbagai perjanjian perdagangan di antara negara-negara anggota ASEAN, APEC, NAFTA, dsb.

PERANAN HUKUM DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI (2 SKS)

Matakuliah ini membahas tentang hubungan antara hukum dan ekonomi; hubungan antara hukum dan pembangunan; konsep pembangunan ekonomi; analisis ekonomi terhadap hukum.

POLITIK HUKUM AGRARIA (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas perumusan kebijakan Hukum Agraria yang akan dan telah dilaksanakan secara nasional oleh Pemerintah mengenai bagaimana politik (kebijakan) mempengaruhi hukum agraria dengan cara melihat konfigurasi kekuatan yang ada di belakang pembuatan dan penegakan hukum agraria dengan tujuan menciptakan kondisi yang dapat mendukung terwujudnya tujuan hukum agraria. Politik hukum agraria mengatur hubungan hukum antara bangsa, negara dan masyarakat dengan sumber daya alamnya berdasarkan prinsip-prinsip yang mengarahkan pemerintah untuk mewujudkan tujuan Hukum Agraria dalam mengatur persediaan, peruntukan dan penggunaan sumber daya alamnya guna memenuhi kehidupan masyarakat yang terus berubah.

SEJARAH PERKEMBANGAN HUKUM AGRARIA (2 SKS)

Matakuliah Perkembangan Hukum Agraria membahas tentang pengertian dan cabang-cabang Ilmu Hukum Agraria serta perkembangannya, meliputi antara lain pengertian, cabang ilmu hukum agraria, perkembangan hukum agraria sebelum penjajahan, setelah proklamasi, lahirnya UUPA serta pelaksanaannya, dan konsepsi hukum tanah nasional. Setelah mempelajari mata kuliah ini peserta diharapkan dapat mengetahui, memahami dan mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari menyangkut perkembangan hukum agraria.

HUKUM PERUSAHAAN (2 SKS)

Matakuliah ini membahas tentang jenis perusahaan; kedudukan pengurus perusahaan; tanggung jawab perusahaan; harta perusahaan; merger; liquidasi; perbandingan hukum perusahaan.

PENYUSUNAN KONTRAK BISNIS (2 SKS)

Mata kuliah Penyusunan Kontrak Bisnis membahas tentang perkembangan hukum kontrak dalam bidang bisnis serta memberi ketrampilan dalam kontrak drafting dan kontrak analisis khususnya dalam bidang bisnis. Setelah menempuh mata kuliah ini peserta diharapkan mengenal dan memahami macam-macam kontrak serta dapat menganalisa dan menyusun kontrak dalam bidang bisnis sehingga dapat mengaplikasikannya dalam praktek.

PENYELESAIAN SENGKETA BISNIS (2 SKS).

Mata kuliah Penyelesaian Sengketa Bisnis untuk memberikan pemahaman yang lebih mendasar/mendalam serta menyeluruh tentang sengketa bisnis dan penyelesaiannya termasuk penyelesaian sengketa bisnis online, sehingga setelah lulus mahasiswa diharapkan mempunyai kemampuan menganalisis secara teoritis serta menyelesaikan sengketa bisnis secara lebih menyeluruh, kritis dan sitemik.

HUKUM PERSAINGAN & PERLINDUNGAN KONSUMEN (3 SKS)

Mata kuliah ini membahas prinsip-prinsip pembatasan praktek perdagangan; persaingan; anti monopoli; hak-hak konsumen; *product liability*; penyelesaian sengketa.

HUKUM INVESTASI DAN PASAR MODAL (3 SKS)

Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip dalam *direct investment* dan *portofolio investment*; emisi; legal opinion; tanggung jawab profesi; reksadana; transaksi portofolio.

HUKUM LINGKUNGAN DAN PERIJINAN (3 SKS)

Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip hukum dalam pengelolaan lingkungan; analisis mengenai dampak lingkungan; pencemaran; kewajiban perusahaan dalam menjaga lingkungan; lingkungan dan perijinan; perijinan dalam bisnis.

HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL & ALIH TEKNOLOGI (3 SKS)

Matakuliah ini membahas hak cipta; merek; paten; desain industri; sengketa hak milik intelektual; alih teknologi; perjanjian dalam bidang teknologi; konvensi-konvensi; TRIPs, termasuk perkembangan IPR di dunia maya (*cyberlaw*).

HUKUM PERBANKAN (2 SKS)

Matakuliah ini membahas prinsip-prinsip perbankan; jasa pelayanan perbankan; bank sentral; transaksi perbankan; rahasia bank; kredit; tanggung jawab pihak-pihak dalam perbankan; transaksi elektronik; perbankan internasional.

ETIKA BISNIS (2 SKS)

Matakuliah ini memberikan nilai-nilai etika dan moral sebagai landasan bersikap dan berperilaku dalam bisnis dengan mengundang para pakar, rohaniwan, bisnisan dan budayawan. Penekanan pada penggalan nilai etika dan moral yang bersumber pada budaya luhur Bangsa Indonesia serta penerapannya pada praktek bisnis di Indonesia.

HUKUM PAJAK (2 SKS)

Materi kuliah akan membahas tentang prinsip-prinsip Hukum Pajak dikaitkan dengan penarikan pajak dalam praktek baik dalam hukum bisnis dan dalam hukum lainnya.

TOPIK KHUSUS (2 SKS)

Matakuliah ini membahas beberapa topik-topik aktual dalam bidang hukum dan bisnis. Topik tersebut akan dibawakan oleh beberapa akademisi dan praktisi yang berkompeten.

PENATAAN RUANG (2 SKS)

Matakuliah ini membahas hal-hal yang terkait dengan penataan ruang, diantaranya meliputi pengertian penataan ruang, landasan hukum, asas-asas dan tujuan, hak dan kewajiban, perencanaan dan pemanfaatan, pengendalian, rencana tata ruang wilayah, propinsi, kabupaten/ kotamadya, wewenang dan pembinaan pemerintah dalam penataan ruang, penerapan rencana tata ruang dalam pembangunan.

PENGURUSAN HAK-HAK ATAS TANAH (3 SKS)

Matakuliah ini merupakan salah satu bidang tata laksana pertanahan yang menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan tata laksana dan pelayanan pengurusan hak-hak atas tanah. Bidang pengurusan hak-hak atas tanah ini berfungsi melaksanakan peraturan perundang-undangan di bidang pertanahan yang mengatur pengurusan hak-hak atas tanah yaitu mengurus pemberian, perpanjangan jangka waktu, pembaharuan, peralihan, pembebanan, penghentian dan pembatalan hak-hak atas tanah. Di samping itu juga mengurus dan mengawasi pengadaan tanah untuk pembangunan hukum di bidang pertanahan dan kegiatan penertiban hak atas tanah.

PEMILIKAN DAN PENGUSAHAAN TANAH (3 SKS)

Mata kuliah Pemilikan dan Penguasaan Tanah membahas ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur tentang pemilikan dan penguasaan tanah menurut hukum tanah nasional, meliputi antara lain: istilah, macam, kewenangan, subyek, timbulnya pembebanan, hapusnya, dan sebagainya. Setelah mengikuti mata kuliah ini, peserta diharapkan dapat mengetahui, memahami, dan mengaplikasikan dalam praktek kehidupan sehari-hari menyangkut pemilikan dan penguasaan tanah.

PENDAFTARAN TANAH (2 SKS).

Mata kuliah ini membahas salah satu dari bidang agraria yaitu mengenai pendaftaran tanah menurut UUPA yang meliputi: pengertian pendaftaran tanah, asas-asas pendaftaran tanah,

sistem pendaftaran tanah, tata cara pendaftaran tanah, baik pendaftaran untuk pertamakalinya maupun pendaftaran tanah pada tahapan pemeliharaan karena terjadi peralihan, hapusnya dan pembebanannya dalam rangka menciptakan kepastian hak atas tanah bagi bangsa Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia. Setelah peserta mengikuti mata kuliah ini diharapkan dapat mengerti dan memahami bagaimana proses penyelenggaraan pendaftaran tanah menurut UUPA dalam rangka menuju kepastian hukum hak atas tanah bagi bangsa Indonesia di seluruh wilayah Republik Indonesia.

PERBANDINGAN HUKUM PERTANAHAN (3 SKS)

Mata kuliah ini memperkenalkan hukum agraria (khususnya hukum pertanahan) negara-negara lain. Pembahasan meliputi antara lain sejarah perkembangan hukum agraria, dasar-dasar hukum agraria dan aturan hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah, politik agraria. Di samping itu akan membahas tentang organisasi regional Uni Eropa dengan Komisi Agrariannya, dimana keputusan-keputusannya mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara anggota dalam mengambil kebijakan agraria (khususnya pertanahan). Mata kuliah ini selanjutnya akan membahas dan menganalisis, mengkaitkan aspek-aspek penting dengan hukum agraria Indonesia.

HUKUM JAMINAN ATAS TANAH (2 SKS)

Mata kuliah Hukum Jaminan Atas Tanah ini membahas mengenai Hak Jaminan Atas Tanah yang sesuai dengan Hukum Tanah Nasional (UU No.5 Tahun 1960) yaitu Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda yang Berkaitan Dengan Tanah (UU No.4 Tahun 1996), sebagai penyempurnaan dari ketentuan mengenai hypotheek yang diatur dalam Buku II KUHPerdara dan ketentuan mengenai *credietverband* dalam *staatsblad* 1908-542 jo. 1937-190. Hak tanggungan atas tanah merupakan salah satu alternatif untuk memperoleh dana melalui kegiatan perkreditan. Lahirnya hak tanggungan atas tanah merupakan jawaban atas perlunya suatu lembaga hak jaminan yang kuat dan mampu memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga sebagai unifikasi hukum tanah nasional. Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat lebih mengenal dan memahami Hak Tanggungan Atas Tanah Berserta Benda-benda yang Berkaitan dengan Tanah, sehingga mampu mengidentifikasi dan menganalisa persoalan-persoalan hukum yang timbul sehubungan dengan keberadaan Hak Tanggungan sebagai salah satu lembaga jaminan yang mempunyai arti penting untuk memperoleh dana melalui kegiatan perkreditan.

CYBERLAW (3 SKS)

Matakuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman betapa pentingnya *cyberlaw* dalam dunia maya. Pembahasan meliputi pertanggungjawaban *cyberlaw* secara filosofis, berbagai dasar-dasar HaKI (Hak Atas Kekayaan Intelektual), pengenalan dunia maya/siber dan telematika, etika dan moralitas dalam dunia maya, hubungan produksi, isu-isu produksi yang lain, isu-isu pasca produksi, isu *on-line* dan pendidikan, berbagai macam kasus pelanggaran HaKI dalam bidang Telematika (Telekomunikasi dan Informatika), akses dan database situs HaKI nasional dan internasional serta E-commerce.

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL (2 SKS)

Mata kuliah ini membahas kilas balik perdagangan internasional, peranan ahli hukum dalam perdagangan internasional, hambatan dalam perdagangan internasional, dan sumber hukum

kontrak dagang internasional beserta isu dasar dalam kontrak dagang internasional tersebut. Selain itu juga dibahas tentang alternatif penyelesaian sengketa.

PERBANDINGAN HUKUM PERTANAHAN (2 SKS)

Mata kuliah ini memperkenalkan hukum agraria (khususnya hukum pertanahan) negara-negara lain. Pembahasan meliputi antara lain sejarah perkembangan hukum agraria, dasar-dasar hukum agraria dan aturan hukum tentang pemilikan dan penguasaan tanah, politik agraria. Selain itu akan dibahas tentang organisasi regional Uni Eropa dengan Komisi Agrariannya, yang keputusan-keputusannya mempunyai pengaruh besar terhadap negara-negara anggota dalam mengambil kebijakan agraria (khususnya pertanahan). Selanjutnya akan dibahas, dianalisis, dan dikaitkan dengan aspek-aspek penting hukum agraria Indonesia.

TESIS (6 SKS)

Karya akhir berisi suatu analisis berlevel strata-2 / pascasarjana terhadap satu dari beberapa aspek hukum.

5. TENAGA PENGAJAR

Perkuliah di Fakultas Hukum UAJY diberikan oleh Guru Besar, Doktor dan Dosen yang sebagian besar bergelar Master baik lulusan dalam maupun luar negeri. Jabatan akademik Lektor Kepala telah mendekati 70% dari seluruh Dosen yang ada. Jalinan kerja sama yang luas dengan perguruan tinggi luar negeri terwujud baik dalam pengadaan fasilitas pustaka maupun dalam pertukaran Dosen. Berkat jalinan kerja sama ini, secara periodik dosen-dosen asing mengajar di FH UAJY. Dosen tamu juga berasal dari para praktisi baik instansi pemerintahan maupun kalangan pengusaha yang secara berkala memberikan tambahan bekal bagi mahasiswa.

Dosen Tetap dan Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

1. Prof. Dr. R.M. Sudikno Mertokusumo, S.H. (S.H.-UGM, Dr.-UGM)
2. Prof. Dr.F. Sugeng Istanto, S.H. (S.H.-UI, Dr.-UGM)
3. Prof. Dr. MG. Endang Sumiarni, Dra., S.H., M.Hum. (Dra-UGM,S.H.-UAJY,M.Hum.; Dr.,- UNAIR)
4. Dr. Todung Mulya Lubis, S.H., LL.M. (S.H.,-UI, LL.M. California Univ., Dr.-UI)
5. Dr. Albert Hasibuan, S.H. (Dr. – UGM)
6. Dr. Martino Sardi (Dr. – TOR VERGATA- Italia)
7. Dr.J. Gunarto Suhardi, S.H. (Dr. – UNAIR)
8. Dr. Ign. Sumarsono Raharjo, S.H., M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.-UNAIR, Dr.-UNAIR)
9. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum. (Drs.-IKIP SADHAR, S.H.-UWWMY, M.Hum.- UNDIP, Studi S3 UGM)
10. Y. Sari M. Widiyastuti, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UGM, Studi S3UGM)
11. St. Mahendra Soni Indrio, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UNDIP, Studi S3 UNDIP)

12. Aloysius Wisnubroto, S.H., M.Hum. (S.H.-UNS, M.Hum.-UNDIP, Studi S3 UNDIP)
13. G. Widiartana, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UNDIP, Studi S3 UNDIP)
14. E. Sundari, S.H., M.Hum. (S.H.-UNS, M.Hum.- UGM, Studi S3 UGM)
15. V. Hari Supriyanto, S.H.,M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum,- UGM, Studi S3 UGM)
16. OJB. Ohim Sindudisastra, S.H., M.Hum (S.H.-UGM, M.Hum.-UGM)
17. J. Widiantoro, S.H., M.H. (S.H.-UAJY, M.H.-UI)
18. Tonny Pongoh, S.H., LL.M. (S.H.-UGM, LL.M.-Queensland Univ. Of Technology Australia)
19. F.X. Endro Susilo, S.H., LL.M. (S.H.-UGM, LL.M.-ILINOIS-USA)
20. G. Aryadi, S.H., M.H. (S.H.-UGM, M.H.- UI)
21. F.X. Soedijana, S.H. (S.H.-UGM)
22. S.W. Endah Cahyowati, S.H., M.S. (S.H.-UGM, M.S.-UGM)
23. Iswantiningsih, S.H., M.S. (S.H.-UGM, M.S.-UGM)
24. Muljani Morisco, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UGM)
25. CH. Medi Suharyono, S.H., M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.- UNDIP)
26. Sumyar, S.H.,M.Hum. (S.H.-UGM., M.Hum. UGM)
27. Anny Retnowati, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum. – UNDIP)
28. B. Bambang Riyanto, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UNPAD)
29. Chryssantus Kastowo, S.H., M.H. (S.H.-UGM, M.H.-UI)
30. Y. Hartono, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UNPAD)
31. D. Krismantoro, S.H., M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.-UGM)
32. B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.-UNPAD)
33. Y. Triyana, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UNPAD)
34. G. Sri Nurhartanto, S.H., LL.M. (S.H.-UNDIP, LL.M.-Nothern Territory Univ. Australia)
35. P. Prasetyo Sidi Purnomo, S.H., M.S. (S.H.-UGM, M.S.- UI)
36. St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum. (S.H.-UNIKA. Soegijapranata, M.Hum.-UNDIP)
37. Hyronimus Rhiti, S.H., LL.M. (S.H.-UAJY, LL.M.-Trier University Jerman)
38. Helidorus Chandra, S.H., M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.-UGM)
39. Theresia Anita Christiani, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.-UNDIP)
40. C. Woro Murdiati R., S.H., M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.-UGM)
41. Y. Sri Pudyatmoko, S.H.,M.Hum. (S.H.-UNS, M.Hum. - UNDIP)
42. H. Untung Setyardi, S.H.,M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum. - UGM)
43. W. Riawan Tjandra, S.H.,M.Hum. (S.H.-UNBRAW, M.Hum.,- UGM)
44. N. Budi Arianto Wijaya, S.H.,M.Hum. (S.H.-UNS, M.Hum.,- UNDIP)
45. Maria Hutapea, S.H.,M.Hum. (S.H.-UAJY., M.Hum - UNPAR)
46. R. Sigit Widiarto, S.H., M.Hum. (S.H.-UGM, M.Hum.,- UGM)

47. Imma Indra Dewi W., S.H.,M.Hum. (S.H.-UAJY, M.Hum.,- UGM)
48. Junirahardjo, S.H. (S.H.-UGM)
49. FX. Suhardana, S.H. (S.H.-UGM)